

Judul : Bali dan Raja Ampat diakui dunia. pariwisata mulai bangkit
Tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bali Dan Raja Ampat Diakui Dunia

Pariwisata Mulai Bangkit

Sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Caranya dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur pariwisata.

ANGGOTA Komisi X DPR Lestari Moerdijat mengatakan, peluang sektor pariwisata itu diperkuat dengan penghargaan dari institusi internasional terhadap beberapa destinasi wisata di Indonesia. Seperti Bali yang oleh majalah Time ditetapkan sebagai "The Greatest Place 2022" dan "The World's Happiest Holiday Destinations 2022" oleh Club Med Prancis.

Begitu juga penghargaan sebagai "Best Travel Destinations" untuk Raja Ampat dari majalah Lonely Planet. "Pengakuan oleh internasional itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini," ujar wanita yang disapa Rerie ini.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

sudah mencapai 3,92 juta. Sedangkan di sisi ekonomi kreatif, nilai eksportnya sudah mencapai 24,79 miliar dolar AS atau meningkat 3,8 persen dengan nilai tambah sebesar Rp 1,236 triliun.

Dengan pencapaian tersebut, lanjutnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) akan mampu membuka 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024. Hal itu harus mampu direalisasikan dengan optimisme yang tinggi.

Untuk mendukung semangat tersebut, kata Politikus Partai NasDem itu, pekerjaan rumah yang masih dan harus terus dilakukan adalah konsistensi dalam meningkatkan mutu SDM. Begitu juga peningkatan infrastruktur di daerah-daerah kawasan wisata.

"Kelengkapan infrastruktur bandara, pelabuhan dan

jalan menuju dan di kawasan-kawasan wisata demi semakin mempermudah wisatawan dalam menikmati layanan dan keindahan alam Indonesia," ucapnya.

Sejumlah peluang mendatangkan wisatawan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lewat sejumlah kebijakan dan program wisata. "Program wisata religi bagi umat Budha di dunia dengan destinasi kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah, juga bisa dikembangkan untuk membuka peluang tersebut," kata Rerie.

Dia bilang, sudah selayaknya seluruh pemangku kepentingan sektor Parekraf bekerja sama untuk mewujudkan pariwisata nasional yang tangguh dan kreatif dalam menghadapi setiap perubahan.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menambahkan, pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berkorelasi dengan peningkatan capaian pariwisata pada tahun 2023. Ia menyebut ada tiga faktor faktor dalam

pencabutan PPKM yang dapat mendorong geliat pariwisata.

Pertama, pencabutan PPKM berarti pembebasan mobilitas masyarakat serta kuota destinasi wisata. "Tentu hal ini meningkatkan minat wisatawan," ujar Hetifah dalam keterangannya, kemarin.

Kedua, secara psikologi, masyarakat pada umumnya telah haus akan berwisata selama beberapa tahun terakhir. Ketiga, pencabutan PPKM menyiratkan Pemerintah telah berhasil menangani Covid-19. Hal ini meningkatkan rasa aman pada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

"Karenanya, dicabutnya PPKM dapat disikapi sebagai momentum tepat untuk melepas dahaga wisata para wisatawan," kata dia.

Hetifah memaparkan, ada empat langkah yang harus diperhatikan para pelaku usaha wisata. Pertama, tren wisata kini sangat memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan sehingga standar Cleanliness,

Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) harus diimplementasikan dengan baik.

Kedua, pemasaran paket wisata harus betul-betul memanfaatkan sosial media mengingat semakin bergantungnya masyarakat terhadap info dari dunia digital. Ketiga, fasilitas dan amenities yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), hotel, tempat ibadah, restoran, tempat oleh-oleh, hingga sarana transportasi.

Keempat, di era persaingan setelah Covid-19 ini, inovasi produk-produk wisata harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar. Terakhir, berbagai pihak dapat menyelaraskan kebijakan dan menginformasikannya secara utuh kepada masyarakat.

Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat terjadi ketidakpastian harga tiket ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur yang mempengaruhi minat para wisatawan asing. Bahkan, banyak yang membatalkan perjalanannya. ■ TIF